

Evaluasi Kebijakan Ketahanan Pangan Program Bantuan Beras Cadangan Pangan Pemerintah 2024

Siti Noor Khatija Ibrahim^{1)*}, Farida Hidayati²⁾, Rifandi Umaternate³⁾, Taufiqurrokhman⁴⁾

^{1)*} Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia, siti.noorkhatija@student.umj.ac.id

²⁾ Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia, farida.hidayati@student.umj.ac.id

³⁾ Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia, rifandi.umaternate@student.umj.ac.id

⁴⁾ Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia, taufiqurrokhman@umj.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi kebijakan bantuan pangan beras oleh Pemerintah Indonesia melalui Badan Ketahanan Pangan Nasional, yang menggunakan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) sebagai sasaran penerima manfaat program. Penelitian ini menggunakan pendekatan SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound*). Metode yang digunakan yakni kualitatif dengan melakukan wawancara kepada tujuh belas orang informan yang dipilih secara *purposive sampling*. Lokus penelitian di Kecamatan Solor Timur. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi partisipan. Sumber data yang digunakan yakni data primer dan sekunder, dengan teknik analisis model interaksi. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan bantuan pangan beras tahun 2024, sebagai bagian dari Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) belum berjalan optimal. Program ini memenuhi indikator *specific* dan *measurable* untuk menilai keberhasilannya, namun masih terdapat kesenjangan antara sasaran yang ditetapkan dan hasil yang dicapai. Kasus *exclusion and inclusion error* masih terjadi meskipun telah ada upaya meningkatkan keakuratan data sasaran penerima manfaat dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi P3KE. Berdasarkan indikator *achievable*, program ini belum efektif dan perlu meningkatkan relevansi dalam penetapan penerima manfaat. Dari segi *time-bound*, program ini memiliki batas waktu yang jelas.

Kata Kunci: Akurasi Data, Ketahanan Pangan Nasional, Model Evaluasi SMART

Abstract

The purpose of this study is to evaluate the rice food assistance policy by the Government of Indonesia through the National Food Security Agency, which uses data from the Targeting for the Acceleration of the Elimination of Extreme Poverty as the target beneficiaries of the program. This research uses the SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound) approach. The method used is qualitative by conducting interviews with seventeen informants selected by purposive sampling. The research locus was in East Solor sub-district. Data collection was conducted through interview techniques, documentation, and participant observation. The data sources used are primary and secondary data, with interaction model analysis techniques. The results showed that the 2024 rice food assistance policy, as part of the Government Food Reserve, has not run optimally. The program meets specific and measurable indicators to assess its success, but there are still gaps between the targets set and the results achieved. Cases of exclusion and inclusion errors still occur despite efforts to improve the accuracy of target beneficiaries from the Integrated Social Welfare Data (DTKS) to P3KE. Based on the achievable and time-bound indicators, this program has not been effective and needs to increase relevance in determining beneficiaries.

Keywords: Data Accuracy, National Food Security, SMART Evaluation Model

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), berkomitmen untuk mencapai kesejahteraan ekonomi dengan melaksanakan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Pangan menjadi salah satu isu yang menjadi fokus utama dalam agenda PBB tahun 2030, khususnya pada *Goals 2* SDGs yakni mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan perbaikan gizi, serta memajukan sektor pertanian yang berkelanjutan (WHO, 2015). Masalah kelaparan dan kerawanan pangan global sebagai akibat dari pandemi, konflik, perubahan iklim, dan kesenjangan telah menjadi perhatian sejak tahun 2015 (WHO, 2015). Sebagai bagian dari komunitas internasional, Indonesia tidak dapat menghindari dinamika global ini. Dengan perubahan iklim yang semakin jelas, dunia menghadapi ancaman krisis pangan yang mengganggu ketahanan pangan secara keseluruhan (Arlyan, 2018; Saefudin, 2023; Triani & Magello, 2024).

Salah satu bentuk perubahan iklim yang menjadi tantangan dalam mencapai ketahanan pangan berkelanjutan di Indonesia adalah fenomena El-Nino. El Nino merupakan fenomena alam berulang yang terjadi di bagian tengah dan timur Samudra Pasifik, dicirikan oleh kenaikan suhu laut yang tidak lazim (Triani & Magello, 2024). Dampaknya seringkali memengaruhi pola cuaca global, menyebabkan perubahan signifikan dalam pola hujan, suhu atmosfer, serta arah angin di berbagai wilayah dunia, termasuk Indonesia (Putranto, 2021; Saefudin, 2023). Untuk mengatasi dampak yang disebabkan oleh perubahan iklim ini, diperlukan langkah strategis dalam menghadapi potensi penurunan produksi pertanian dan lonjakan harga pangan, guna menghindari gejolak ekonomi dan sosial di tengah masyarakat (Saefudin, 2023).

Pemerintah Indonesia melalui Badan Pangan Nasional, telah menetapkan fokus utama pada upaya mitigasi risiko El Nino dan pemeliharaan daya beli masyarakat, terutama bagi kalangan ekonomi menengah ke bawah dalam memenuhi kebutuhan pangan. Salah satu langkah yang diambil melalui distribusi beras sebagai bagian dari Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), yang dilaksanakan dari Januari hingga Juni 2024. Pelaksanaan program ini sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah. Langkah tersebut juga berfungsi sebagai upaya menekan harga beras bagi konsumen dan menjaga tingkat inflasi nasional (Kemenko Perekonomian RI, 2024).

Survei dilakukan oleh TNP2K pada Desember 2021 menemukan bahwa, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kurang efektif dalam menjangkau kelompok miskin ekstrem karena tidak ada variabel pemeringkatan. Hal ini memperbesar potensi kebocoran bantuan sosial kepada keluarga yang relatif mampu. Survey ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa, program-program seperti BST, BPNT, PKH, BLT yang menggunakan DTKS sebagai acuan penerima manfaat belum optimal dalam mencapai tujuannya karena masalah pendataan, penyaluran, dan pemanfaatan dana bantuan masih ada (Adji et al., 2022; Laurentcia & Yusran, 2021; Rahmansyah et al., 2020; Tumbel et al., 2021; Yuriske et al., 2023). Untuk mengatasi hal ini, dilakukan studi untuk memperingkat keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraan menggunakan data Pendataan Keluarga (PK) BKKBN tahun 2021. Hasilnya adalah data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang dilengkapi informasi tingkat kesejahteraan keluarga (Adji et al., 2022). Oleh karena itu, dalam penentuan sasaran program bantuan pangan beras CPP 2024, pemerintah tidak lagi menggunakan DTKS melainkan menggunakan data P3KE untuk menetapkan sasaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Meskipun demikian, realitas di lapangan menunjukkan kesenjangan antara tujuan program dan hasil yang tercapai. Fenomena ini tergambar dengan jelas dalam kasus 17 Desa di Kecamatan Solor Timur. Ketidaksiharian antara data P3KE dengan kondisi aktual di lapangan menjadi permasalahan utama. Data miskin ekstrem yang dikategorikan dalam Desil 1 sampai Desil 3 tidak mencerminkan kondisi riil di masyarakat. Banyak penerima

manfaat bantuan pangan beras sebenarnya bukan merupakan bagian dari kelompok Desil 1, 2, atau 3. Sebaliknya, banyak keluarga miskin yang seharusnya masuk ke dalam kelompok Desil 1, 2, atau 3 namun tidak tercatat dalam data P3KE. Artinya, meskipun telah ada usaha meningkatkan akurasi data dengan data P3KE, masih ada kesenjangan antara target program dan hasilnya.

Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam untuk memahami dinamika program bantuan pangan beras CPP yang menggunakan data P3KE sebagai basis penargetan sasaran program. Dalam konteks kebijakan bantuan pangan beras CPP 2024 di Indonesia, pendekatan SMART merupakan salah satu metode yang cukup signifikan dalam mengevaluasi kebijakan tersebut. SMART merujuk pada lima elemen yang digunakan dalam metode manajemen proyek untuk merumuskan tujuan yang efektif dan terukur (Bjerke & Renger, 2017). Lima elemen tersebut meliputi *specific* (spesifik), *measurable* (terukur), *achievable* (dapat dicapai), *relevant* (relevan), dan *time-bound* (batasan waktu). Pendekatan ini, dimaksudkan untuk mempermudah identifikasi tujuan, apa yang ingin dicapai, dan untuk siapa tujuan tersebut ditujukan dengan cepat, serta memfasilitasi pelacakan kemajuan dalam mencapai tujuan tersebut (Efendi & Tohet, 2023). Sehingga, dengan mengadopsi pendekatan ini, diharapkan dapat mengidentifikasi dengan lebih jelas kelemahan-kelemahan pada kebijakan bantuan pangan beras dan potensi-potensi perbaikan yang dapat dilakukan.

Merujuk pada penelitian-penelitian sebelumnya, belum adanya penelitian mengenai evaluasi kebijakan bantuan pangan beras di Indonesia dengan pendekatan SMART, meskipun masalah terkait distribusi bantuan sosial telah menjadi isu yang berulang dalam konteks pembangunan sosial di negara ini. Sejalan dengan itu, penelitian ini merupakan langkah yang sangat relevan dan mendesak untuk secara sistematis mengevaluasi kebijakan bantuan pangan beras berbasis data P3KE, dan memberikan landasan pengembangan solusi yang lebih efisien dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Lokus penelitian di Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur, dengan melakukan wawancara kepada tujuh belas orang informan yang terdiri dari Kepala Desa, Perangkat Desa, Operator Desa, dan warga masyarakat desa di wilayah Kecamatan Solor Timur. Penentuan informan ini dilakukan dengan cara *purposive sampling*. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan studi dokumentasi, dan observasi partisipan. Sumber data yang digunakan yakni data primer dan sekunder, dengan teknik analisis model interaksi Miles B. Huberman yang meliputi *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification* (Miles et al., 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Ketahanan Pangan di Indonesia

Kondisi ketahanan pangan di Indonesia terus menghadapi berbagai tantangan, salah satunya fenomena El Nino. El Nino memiliki potensi menghambat produksi pangan baik secara regional maupun global yang dampaknya bisa sangat signifikan jika daerah yang biasanya menjadi produksi pangan utama terkena dampaknya. Jika produksi pangan menurun akibat El Nino, sementara permintaan tetap tinggi atau bahkan meningkat, bisa terjadi ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan pangan. Sebagaimana situasi perberasan di Indonesia saat ini yang menghadapi tantangan serius meliputi, penurunan produksi, penurunan stok beras, kontribusi inflasi beras, kelangkaan pupuk, menurunnya kinerja alsinta, dan menurunnya pendapatan petani (Saefudin, 2023).

Penurunan produksi beras dalam negeri sebagai akibat perubahan iklim dan serangan hama menjadi perhatian penting. Ketidakmampuan produksi dalam negeri untuk memenuhi

seluruh kebutuhan pangan mengakibatkan Indonesia harus mengandalkan impor pangan hampir setiap tahun. Pada tahun 2023, pemerintah mengimpor beras sebanyak 3,5 juta ton, jumlah tertinggi sejak krisis moneter pada tahun 1997. Jumlah ini mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan tahun 2022, di mana jumlah impor hanya mencapai 429 ribu ton (BPS, 2024). Impor yang dilakukan pemerintah tidak terlepas dari tingginya permintaan akan beras di Indonesia dan juga dipengaruhi oleh harga beras di dalam negeri. Data dari BPS pada bulan Februari 2024 menunjukkan bahwa harga beras, terutama kualitas premium, di Indonesia mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Harga rata-rata beras kualitas premium mencapai Rp. 14.9525/kg, naik sebesar 6,31 persen dibandingkan bulan sebelumnya dan naik sebesar 22,91% dibandingkan bulan Februari 2023 (BPS, 2024). Begitu pula dengan harga beras kualitas medium dan *low*, keduanya juga mengalami kenaikan yang cukup tajam. Sebagaimana kenaikan harga beras di pasar domestik Kecamatan Solor Timur, mengalami peningkatan yang sangat signifikan mencapai Rp. 15.000 sampai Rp. 16.000/kg dengan kualitas beras medium.

Hingga Februari 2024, harga beras mengalami inflasi sebesar 5,32%, yang memberikan kontribusi sebesar 0,21% terhadap inflasi secara keseluruhan (BPS, 2024). Artinya, kenaikan harga beras menyebabkan pengeluaran masyarakat untuk membeli beras meningkat, sehingga menyisakan lebih sedikit uang untuk digunakan pada kebutuhan lainnya. Hal ini dapat mengurangi daya beli masyarakat secara keseluruhan dan mengarah pada kesulitan dalam memenuhi kebutuhan makanan sehari-hari. Umumnya, dalam menghadapi kesulitan membeli makanan, rumah tangga yang kurang mampu sering kali mengadopsi strategi yang berisiko bagi keamanan pangan mereka yang dapat memperparah kondisi kemiskinan mereka (Amrullah et al., 2021).

Keterbatasan pasokan dan kenaikan harga pupuk juga menjadi masalah serius karena pupuk memegang peran krusial dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Selain itu, penurunan kinerja alsintan, yang umumnya sudah tua dan mendekati akhir usia teknisnya, dapat menghambat peningkatan produktivitas di sektor pertanian. Ditambah dengan pendapatan petani yang rendah, hanya sekitar Rp231.000,00 per bulan, menunjukkan kondisi ekonomi yang sulit bagi mereka (Saefudin, 2023). Situasi keterbatasan pangan di Indonesia menjadi perhatian penting karena ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat terkait erat dengan ketersediaan dan aksesibilitas pangan yang memadai. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, negara bertanggung jawab untuk memastikan ketersediaan, aksesibilitas, dan pemenuhan pangan yang cukup bagi seluruh warga negara dengan memanfaatkan sumber daya dan budaya lokal. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu mengambil langkah-langkah komprehensif untuk meningkatkan sektor pertanian dan ketahanan pangan nasional. Langkah-langkah tersebut meliputi dukungan investasi pada teknologi pertanian modern, peningkatan kinerja penyuluh pertanian, pemberian insentif kepada petani, perbaikan manajemen stok beras, penguatan lembaga petani, dan upaya lainnya untuk meningkatkan produksi beras dalam negeri.

Sejak 2002, pemerintah menerapkan program bantuan pangan untuk menjaga stabilitas ketahanan pangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program subsidi pangan awalnya dikenal sebagai Raskin (beras miskin) dan kemudian berganti nama menjadi Rastra pada tahun 2015. Namun, mulai tahun 2017, program ini mengalami perubahan signifikan dengan mengalihkan subsidi pangan ke Bantuan Sosial (Bansos) dalam bentuk Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) (Rachman et al., 2018). Dalam perjalanannya, kebijakan program-program tersebut terus berkembang mengikuti perubahan dan kebutuhan masyarakat.

Salah satu inisiatif terbaru pada tahun 2024 adalah bantuan pangan beras yang merupakan bagian dari program Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Program ini merupakan kelanjutan dari program tahun 2023. Upaya pemerintah untuk menerapkan berbagai kebijakan intervensi menunjukkan tekad yang kuat untuk mengubah atau

meningkatkan perekonomian masyarakat, dengan tujuan meningkatkan daya beli masyarakat secara keseluruhan dan memastikan bahwa masyarakat miskin dapat hidup dengan layak (Tumbel et al., 2021) . Tujuan utama dari program bantuan pangan beras CPP adalah untuk memastikan ketersediaan pangan, bagi masyarakat, terutama dalam menghadapi risiko cuaca ekstrem seperti El Nino. Jumlah beras yang disalurkan sebanyak 10kg dari bulan Januari sampai Juni 2024. Adapun sasaran penerima manfaat program bantuan pangan tersebut sebanyak 22.004.077 KPM, yang terbagi dalam kelompok desil 1 sebanyak 6.878.649 keluarga, desil 2 sebanyak 7.474.796 keluarga, dan desil 3 sebanyak 7.650.632 keluarga (Badan Pangan Nasional, 2024).

Di Kecamatan Solor Timur, program bantuan pangan beras CPP ini telah direalisasikan selama tiga kali tahapan. Adapun rincian sasaran KPM bantuan beras CPP di Kecamatan Solor Timur sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Solor Timur

Nama Desa	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat
Kawuta	94
Labelen	108
Lamawai	113
Lebao	79
Lewogeka	69
Lewohedo	74
Liwo	114
Lohayong I	180
Lohayong II	240

Sumber: Data Riset, 2024

Berdasarkan hasil rapat internal yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 6 November 2023, disepakati bahwa data P3KE akan digunakan sebagai dasar untuk menentukan sasaran penyaluran Program Bantuan Pangan Beras CPP. Dengan pemberlakuan arahan tersebut, maka semua program bantuan dan pemberdayaan pemerintah terkait penanganan fakir miskin tidak hanya bergantung pada DTKS sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2011. Data P3KE juga digunakan sebagai dasar dalam menentukan sasaran penyaluran program-program tersebut, khususnya Program Bantuan Pangan Beras CPP 2024. Hal ini menunjukkan pergeseran dalam pendekatan dan penggunaan data dalam upaya penanganan kemiskinan.

Sumber data sebagai sasaran penerima manfaat program bantuan sosial terus mengalami perubahan seiring zaman. Sumber data ini telah mengalami beberapa kali perubahan, seperti yang terlihat dalam tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2. Perkembangan Perubahan Sumber Data Sasaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial

Periode	Sumber Data	Hasil Cakupan Data	Penggunaan Data
1998 – 2005	BKKBN	Keluarga Prasejahtera & Sejahtera 1: 12,8 juta KK	Sasaran Program OPK/Raskin
2006 – 2009	PSE 2005	RTSM, RTM & RTHM: 19,1 Rumah Tangga	Sasaran Program BLT, PKH, Raskin
2010 - Mei 2012	PPLS 2008	RTSM, RTM & RTHM: 17,5 Juta Rumah Tangga/60,4 Jiwa	Sasaran Bansos (Raskin, PKH, dll)
Juni 2012 – 2014	PPLS 2011	BDT: 25 Juta Rumah Tangga/92 Juta Jiwa	Sasaran Bansos (Raskin, PKH, dll)
2015 – 2016	PBDT 2015	Pembaharuan Data PPLS 2011: 92.994.742 Jiwa	Sasaran Bansos (Rastra, PKH, dll)

2017 – 2018	DT-PPFM & OTM & Usulan SIKS-NG	Pembaharuan Data PBDT 2015	Sasaran Bansos Pusat & Daerah
2019 – 2023	DTKS	Pembaharuan DT-PPFM & OTM	Sasaran Bansos Pusat & Daerah
2024	PK BKKBN 2021	Pemerinkkatan Data Desil – Desil 10	Sasaran Bansos Pusat & Daerah (Bantuan Beras CPP)

Sumber: Satuan Tugas P3KE, 2023; Widyarningsih et al., 2022 (diolah)

Pergeseran data sasaran dalam program bantuan sosial menjadi tantangan tersendiri. Meskipun program-program bantuan sosial telah berjalan selama hampir 26 tahun, pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan rencana. Kasus *inclusion error* maupun *exclusion error* masih terus terjadi menyebabkan kesalahan dalam penentuan siapa yang termasuk dan tidak termasuk dalam program bantuan (Susantyo & Nainggolan, 2019). Sebagaimana yang terjadi di Kecamatan Solor Timur, ketika penyaluran bantuan pangan beras CPP. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa, meskipun ada upaya untuk meningkatkan akurasi data dari DTKS menjadi P3KE dalam penentuan sasaran program bansos, namun tidak selalu secara langsung menghasilkan penyaluran bantuan yang lebih tepat sasaran. Akibatnya, pengelola program di lapangan sering kali menjadi sasaran kekecewaan masyarakat, bahkan kemarahan dari pihak-pihak yang terkena dampaknya.

Akurasi Data P3KE

Data P3KE merupakan sistem data yang mencakup informasi berdasarkan nama, alamat, dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari 80% populasi, diurutkan berdasarkan tingkat kesejahteraannya. Data ini membagi keluarga menjadi sepuluh kelompok, mulai dari desil 1 hingga desil 10, dengan masing-masing desil mewakili persentase tertentu dari populasi. Desil 1 merupakan kelompok terendah dari segi kesejahteraan, mencakup 10% terendah dari populasi, sementara Desil 10 adalah kelompok tertinggi dengan tingkat kesejahteraan yang paling baik, mencakup 10% tertinggi dari populasi (Satuan Tugas P3KE, 2023).

Berdasarkan data P3KE 2024, Kecamatan Solor Timur sebagai wilayah dengan tingkat pengelompokan Desil 1 hingga 4 tertinggi keempat di Kabupaten Fores Timur. Sebaran jumlah keluarga dan individu yang termasuk dalam kelompok Desil 1 sampai Desil 4 di Kecamatan Solor Timur, sebagai berikut:

Tabel 3. Jumlah Keluarga dan Individu Pada Kelompok Desil 1 Sampai Desil 4 di Kecamatan Solor Timur

Kelompok	Jumlah Keluarga	Jumlah Individu
Desil 1	434	2.769
Desil 2	445	2.444
Desil 3	395	1.905
Desil 4	386	1.651
Total	1.660	8.769

Sumber: Data P3KE, 2024

Tabel di atas menunjukkan bahwa, jumlah individu dengan tingkat kesejahteraan pada kelompok Desil 1 tertinggi dibandingkan Desil 2 sampai 4. Ini mengindikasikan bahwa sebagian besar individu di Kecamatan Solor Timur memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih rendah, karena lebih banyak yang termasuk dalam kelompok Desil 1 daripada kelompok-kelompok kesejahteraan yang lebih tinggi (Desil 2 - 4). Meski demikian, fakta di lapangan menunjukkan bahwa kasus *exclusion and inclusion error* masih terjadi meskipun telah dilakukan upaya untuk meningkatkan keakuratan data dari DTKS menjadi P3KE dalam menetapkan sasaran program bantuan. Terdapat keluarga yang seharusnya mendapatkan bantuan sosial, namun dalam prakteknya tidak terdaftar sebagai penerima (*exclusion error*).

Di sisi lain, keluarga yang seharusnya tidak memenuhi syarat untuk menerima bantuan, namun terdaftar sebagai sasaran penerima bantuan (*inclusion error*).

Masalah ketidakakuratan dalam penyaluran bantuan sosial dan dapat mengakibatkan bantuan tidak sampai kepada mereka yang benar-benar membutuhkannya (Rahmawati, 2020). Kendala-kendala tersebut dapat berdampak negatif secara signifikan pada akurasi data, validitas bantuan sosial, efektivitas program perlindungan sosial, dan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang tidak optimal (Rachma et al., 2022). Oleh karena itu, penting bagi pemerintah baik pusat maupun daerah untuk melakukan verifikasi langsung di lapangan.

Analisis Model Evaluasi SMART

SMART menjadi salah satu pendekatan dalam evaluasi yang pertama kali diperkenalkan oleh George T. Doran dalam karyanya "*There's a S.M.A.R.T. Way to Write Management's Goals and Objectives*" (Doran, 1981). Meskipun awalnya dikembangkan dalam konteks manajemen, metode SMART juga sering disebut dalam literatur perencanaan/evaluasi program (Chen, 2015) sebagai dasar untuk melakukan evaluasi, pemantauan, dan peningkatan program (Picciotto, 2002; Preskill & Boyle, 2008). SMART merujuk pada lima elemen yang digunakan untuk merumuskan tujuan yang efektif dan terukur (Bjerke & Renger, 2017). Lima elemen tersebut meliputi *specific* (spesifik), *measurable* (terukur), *achievable* (dapat dicapai), *relevant* (relevan), dan *time-bound* (batasan waktu).

Pendekatan ini bertujuan untuk memudahkan identifikasi tujuan, apa yang ingin dicapai, dan untuk siapa tujuan tersebut ditujukan dengan cepat. Selain itu, pendekatan ini juga bertujuan untuk memfasilitasi pelacakan kemajuan dalam mencapai tujuan tersebut. Sebagai hasilnya, pendekatan ini memiliki keunikan tersendiri dan mampu memberikan format evaluasi yang komprehensif dan menyeluruh, mencakup aspek spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatasan waktu. Berkaitan dengan bantuan pangan beras CPP 2024, pendekatan SMART digunakan untuk mengevaluasi program berdasarkan dua indikator utama yakni penyaluran bantuan pangan beras CPP dan penggunaan data P3KE sebagai sasaran penerima bantuan.

Indikator Spesifik (*Specific*) yang utama adalah untuk menetapkan arah implementasi dengan menjawab pertanyaan *what, why, who, where, dan how*. *What* digunakan untuk menentukan tujuan dan sasaran utama dari program. Program ini memiliki tujuan yang jelas dan terperinci, yaitu memitigasi risiko bencana El Nino dan mempertahankan daya beli masyarakat dengan total sasaran sebanyak 22.004.077 KPM. Hal ini dikarenakan (*why*) perubahan iklim akibat El Nino dapat mengganggu produksi pangan. Ketika produksi pangan menurun, sementara permintaan meningkat, dapat terjadi ketidakseimbangan pasokan dan permintaan pangan. Program ini melibatkan sinergitas berbagai lembaga mulai dari BAPANAS, Kemenko PMK, Pemerintah Desa hingga PT Pos (*who*). Masing-masing pihak ini memiliki tanggung jawab tersendiri dari penentuan kebijakan, penganggaran, penyaluran hingga pemantauan program. Program ini disalurkan kepada semua Desa/Kelurahan di Indonesia (*where*). Bantuan pangan beras ini disalurkan melalui PT Pos. Namun untuk Kecamatan Solor Timur penyaluran bantuan tersebut melalui PT Yasa Artha Trimanunggal (*how*).

Indikator *Measurable* (terukur) yang utama adalah menilai keberhasilan program dalam mencapai tujuan. Indikator *Measurable* yang diukur mencakup distribusi jumlah beras, jumlah keluarga yang menerima, dan dampak program. *Pertama*, jumlah beras yang didistribusikan kepada penerima manfaat dapat diukur secara spesifik yakni mendistribusikan 10 kilogram beras per KPM selama 6 bulan dari bulan Januari sampai Juni 2024. *Kedua*, jumlah keluarga yang menjadi penerima manfaat juga dapat diukur. Sasaran penerima manfaat telah ditetapkan sebanyak 22.004.077 Keluarga Penerima Manfaat yang terbagi dalam kelompok desil 1, 2, dan 3 yang terdaftar dalam data P3KE.

Ketidaksesuaian antara data P3KE dengan kondisi riil di lapangan menunjukkan bahwa fenomena ini mengindikasikan penggunaan data P3KE belum sepenuhnya memenuhi kriteria akurat. Kesenjangan antara data yang digunakan dalam penetapan sasaran dengan kondisi aktual di lapangan memengaruhi efektivitas program dan akurasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. *Ketiga*, meskipun program ini memberikan dampak positif dalam memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat khususnya saat terjadi perubahan iklim akibat fenomena el nino dan kenaikan harga beras, namun dampak negatifnya program ini cenderung menciptakan ketergantungan kurang mendorong kemandirian. Dengan demikian, meskipun program ini memiliki parameter yang dapat diukur, kritikalitas penggunaan data P3KE dan kemampuannya untuk mencerminkan kondisi riil di lapangan perlu dievaluasi lebih lanjut untuk memastikan kesesuaian antara tujuan program dengan hasil yang tercapai.

Indikator *Achievable* (dapat dicapai) mengacu pada pertanyaan apakah tujuan tersebut memungkinkan untuk tercapai. Program bantuan pangan beras CPP ini memiliki potensi untuk berhasil jika sasaran yang tepat dapat ditetapkan dan penyaluran bantuan dilakukan secara efisien sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Namun, fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa program ini belum sepenuhnya memenuhi indikator tercapainya sasaran secara efektif. Meskipun telah ditetapkan sasaran penerima manfaat berdasarkan data P3KE, namun realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara sasaran yang ditetapkan dan hasil yang tercapai. Polemik antara masyarakat dan pemerintah desa menjadi bukti dari ketidakakuratan program dalam menjangkau sasaran yang tepat. Hal ini menyoroti perlunya evaluasi mendalam terhadap proses penetapan sasaran dan pelaksanaan program untuk memastikan bantuan benar-benar diterima oleh mereka yang membutuhkannya dengan tepat dan efisien.

Indikator *Relevant* (Relevan) mengacu pada sejauh mana tujuan program mencerminkan kebutuhan. Pada dasarnya, program bantuan pangan beras CPP secara konseptual memang relevan dengan kebutuhan masyarakat yang rentan terhadap dampak bencana alam dalam hal ini fenomena el nino. Ini menunjukkan bahwa pemerintah telah mengidentifikasi kebutuhan mendesak dalam menyediakan bantuan pangan bagi masyarakat yang terdampak. Namun, ketidaksesuaian antara data P3KE yang digunakan untuk menetapkan sasaran penerima manfaat dengan kondisi aktual di lapangan mengindikasikan bahwa ada celah dalam relevansi program ini. Data P3KE, yang seharusnya menjadi landasan untuk menetapkan sasaran, tidak sepenuhnya mencerminkan realitas sosial dan ekonomi di tingkat lokal, seperti yang terjadi di 17 Desa di Kecamatan Solor Timur. Kesenjangan ini menyoroti perlunya peningkatan relevansi dalam penetapan sasaran penerima manfaat.

Indikator *Time-bound* (Batas Waktu) mengacu pada batas waktu yang ditetapkan untuk mencapai tujuan. Program ini jelas memiliki batas waktu yang telah ditetapkan, mulai dari bulan Januari hingga Juni 2024, seperti yang dijelaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Namun, dalam pelaksanaannya, penyaluran bantuan tidak sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan, yaitu setiap bulan. Hingga bulan Mei, penyaluran beras baru dilakukan di 17 Desa Kecamatan Solor Timur baru sampai tahap 3. Hal ini menunjukkan adanya keterlambatan dalam penyaluran bantuan, yang berpotensi mengganggu keberhasilan program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian terkait evaluasi kebijakan bantuan pangan beras di Indonesia tahun 2024 menggunakan pendekatan SMART (*specific, measurable, achievable, relevant dan time-bound*), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan bantuan pangan beras CPP tahun 2024 yang menggunakan data P3KE untuk menetapkan sasaran penerima belum berjalan optimal. Kemenko PMK perlu melakukan pemutakhiran data ulang melalui verifikasi dan validasi data P3KE sesuai dengan keadaan riil

terbaru di masyarakat. Keterlibatan pemerintah daerah dan desa dalam proses ini sangat penting karena mereka memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang kondisi lokal. Melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah dan desa, dapat dilakukan pemutakhiran data secara berkala untuk memastikan keakuratan dan relevansi data P3KE.

Penting untuk menciptakan sebuah sistem informasi yang memuat data P3KE dan dapat diakses oleh pemerintah desa. Sistem ini harus didesain untuk memudahkan pemerintah desa dalam mengakses, memperbarui, dan memverifikasi data secara periodik. Dengan adanya sistem informasi yang terintegrasi, pembaruan data dapat dilakukan secara efisien dan secara konsisten, sehingga menghasilkan informasi yang lebih akurat dan relevan. Mendorong pemerintah Indonesia untuk memiliki satu basis data terpadu dan terintegrasi yang mencakup informasi mengenai kemiskinan atau tingkat kesejahteraan masyarakat, yang dikelola secara eksklusif oleh satu kementerian agar dapat memangkas kerumitan birokrasi dan tumpang tindih kewenangan. Basis data ini akan digunakan sebagai referensi utama dalam menetapkan sasaran untuk program-program yang bertujuan mengurangi kemiskinan, memberikan bantuan sosial, dan upaya-upaya lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Amrullah, E. R., Pullaila, A., Hidayah, I., & Rusyiana, A. (2021). Dampak Bantuan Langsung Tunai terhadap Ketahanan Pangan Rumah Tangga di Indonesia. *Jurnal Agro Ekonomi*, 38(2), 91. <https://doi.org/10.21082/jae.v38n2.2020.91-104>
- Badan Pangan Nasional. (2024). *Jangan Keliru, Ini Perbedaan Bantuan Pangan Beras dengan Bantuan Sosial Lainnya*. <https://badanpangan.go.id/blog/post/jangan-keliru-ini-perbedaan-bantuan-pangan-beras-dengan-bantuan-sosial-lainnya>
- Bjerke, M. B., & Renger, R. (2017). Being Smart About Writing SMART Objectives. *Evaluation and Program Planning*, 61, 125–127. <https://doi.org/10.1016/j.evalprogplan.2016.12.009>
- BPS. (2024). Perkembangan Nilai Tukar Petani dan Harga Produsen Gabah Februari 2024. *Badan Pusat Statistik*, 47, 2–20. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/12/01/1891/perkembangan-nilai-tukar-petani-dan-harga-produsen-gabah-november-2022.html>
- Chen, H. T. (2015). *Practical Program Evaluation: Theory-driven Evaluation and Integrated Evaluation Perspective* (2nd ed.). Sage Publicatin, Inc New York. https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=NXtZDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&ots=80WDN_z4dl&sig=P4zbJtbxADkFG87mqZJaP8SVUpI
- Doran, G. (1981). There's a S.M.A.R.T. Way to Write Management's Goals and Objectives. In *Management Review* (Vol. 70, Issue 11, pp. 35–36). <https://community.mis.temple.edu/mis0855002fall2015/files/2015/10/S.M.A.R.T-Way-Management-Review.pdf>
- Miles, M. B., Huberman, M. A., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: a Methodes Sorcebook* (3rd ed.). Sage Publicatin, Inc New York. <https://books.google.co.id/books?id=3CNrUbTu6CsC&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>
- Picciotto, R. (2002). The Logic of Mainstreaming: A Development Evaluation Perspective. *Evaluation*, 8(3), 322–339. <https://doi.org/10.1177/135638902401462420>
- Preskill, H., & Boyle, S. (2008). A multidisciplinary model of evaluation capacity building. *American Journal of Evaluation*, 29(4), 443–459. <https://doi.org/10.1177/1098214008324182>
- Rachman, B., Agustian, A., & Wahyudi, N. (2018). Effectiveness and Perspective of Rice for the Poor and Non-Cash Food Assistance (BPNT) Programs. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 16(1), 1–18. <https://epublikasi.pertanian.go.id/berkala/akp/article/view/950/922>
- Saefudin. (2023). Strategi perencanaan menghadapi krisis pangan dan el nino. *Warta BSIP Perkebunan*, 1(3), 21–30. <https://epublikasi.pertanian.go.id/berkala/wartabun/article/download/3457/3544/5133>
- Satuan Tugas P3KE. (2023). *Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 2023 Untuk Pengentasan Kemiskinan Ekstrem*. <https://p3ke.kemenkopmk.go.id/theme/theme02/server/fil-dwl.php?nama=WfmsCo6z.pdf>

- Susantyo, B., & Nainggolan, T. (2019). Integrasi Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan. *Quantum: Jurnal Ilmiah Kesejahteraan Sosial*, XIV(200), 73–84. <https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/Quantum/article/view/1723/899>
- Tumbel, R., Kiyai, B., & Mambo, R. (2021). Dampak Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Dengan Kondisi Ekonomi Masyarakat Di Kelurahan Talikuran Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa. *Dampak Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Dengan Kondisi Ekonomi Masyarakat Di Kelurahan Talikuran Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa*, iii(110), 79–92. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/download/36278/33780>
- Widyaningsih, D., Ruhmaniyati, Toyamah, N., & Hastuti. (2022). Mendorong Pemutakhiran Berkelanjutan terhadap Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. In *Working Paper SMERU: Vol. No 1* (Issue 1). www.smeru.or.id.